

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DALAM USAHA MEMECAHKAN MASALAH KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEMPERBAIKI TINGKAT KEHIDUPAN MASYARAKAT

Oleh: Darwanto¹

ABSTRAK

Masalah penduduk adalah masalah yg kompleks karena menyangkut kualitas, kualitas, persebaran, jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam tulisan ini dibahas mengenai penduduk, kependudukan, aspek-aspek kependudukan, masalah yg dihadapi oleh Pemerintah, serta solusi atau kebijakan untuk mengatasinya agar Indeks Pembangunan (IPM) atau dalam bahasa Inggrisnya *Human Development Indeks (HDI)* meningkat dari tahun ke tahun di mana IPM Indonesia berada di urutan terbawah di Asia Tenggara setelah Vietnam. Banyak kebijakan atau keputusan pemerintah yg sudah atau sedang dilaksanakan. Hal itu bertujuan agar tujuan negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan umum rakyat Indonesia dapat tercapai. Tentunya dengan proses dan bertahap.

Kata kunci: Kebijakan kependudukan, masalah kependudukan, tingkat kehidupan.

¹ Dosen DPK FISIP UNTAG Cirebon, email: akodarwanto312@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Masalah penduduk bukanlah masalah baru akan tetapi telah menjadi masalah klasik yang mengundang pemikiran yang serius untuk dipecahkan. Di satu sisi ada pendapat mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar saat ini merupakan ancaman yang serius, di sisi lain dikatakan bahwa jumlah penduduk yang besar sebenarnya adalah modal yang potensial dalam pembangunan, apabila dibina dengan baik. Hal tersebut juga dimuat dalam GBHN republik Indonesia, bahwa jumlah penduduk yang sangat besar apabila dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha di segala bidang.

Dalam rangka pembinaan tersebut di samping usaha-usaha untuk memperluas dan mengintensifkan kegiatan program Keluarga Berencana, perlu pula ditingkatkan usaha-usaha memperluas serta mempertinggi ilmu pendidikan guna mendapatkan tenaga kerja yang terampil baik pria maupun wanita, terutama tenaga kerja muda yang harus dipersiapkan agar dapat dihadirkan tenaga kerja yang siap pada waktu yang dibutuhkan.

Selain langkah-langkah yang telah dikemukakan di atas, juga dipandang perlu meningkatkan usaha pertanian baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi maupun diversifikasi terutama untuk daerah di luar Jawa, perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan khusus. Pelayanan kesehatan juga ditingkatkan, sebab kesehatan merupakan salah satu persyaratan yang sangat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, dan pelayanan kesehatan yang semakin baik sekaligus dapat membantu keberhasilan program Keluarga Berencana.

Di sisi lain kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk masih sangat tidak seimbang, langkah yang cocok untuk pemecahannya adalah melalui program transmigrasi, di samping pencegahan urbanisasi secara besar-besaran, sebab usaha tersebut tidak hanya mengurangi penduduk di daerah yang padat penduduknya, tetapi juga akan membuka daerah industri baru di luar Jawa sekaligus akan menunjang usaha-usaha di bidang pertahanan keamanan.

Semua langkah-langkah tersebut di atas diharapkan dapat memecahkan masalah kependudukan sekaligus dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti yang selalu diamanatkan oleh negara melalui GBHN.

II. PERMASALAHAN

Untuk mempelajari sebab musabab terjadinya pertumbuhan penduduk ada dua kerangka, yaitu : *pertama*; kerangka yang berkaitan dengan usaha penduduk mengenai mata pencaharian atau penghidupannya. Perkembangan atau penambahan penduduk dari jumlah yang semula, dikarenakan manusia itu sendiri mampu melaksanakan penghidupannya yang minimum dari sumber-sumber daya alam yang ada di sekitarnya. *Kedua*, kerangka untuk menguji atau menyelidiki tentang sebab musabab pertumbuhan penduduk yang terbatas pada dua unsur, yakni angka/kecepatan kelahiran dan angka/kecepatan kematian yang pada dasarnya penduduk tidak akan bertambah jika angka kelahiran tidak melampaui angka

kematian, dan yang terbesar dari perbedaan kedua angka tersebut (tentunya angka kelahiran) akan merupakan angka pertumbuhan atau penambahan penduduk.

Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini kurang lebih 230 juta jiwa, laju pertumbuhan penduduk yang demikian besar disebabkan angka kelahiran tiap tahunnya kurang lebih 1,3 %. Sebelum dimulainya Pelita dan dengan kerja keras kita baru mampu menekan pertumbuhan penduduk kurang lebih 2,1 % pada awal Pelita ke V, jumlah penduduk yang besar tadi, tentunya merupakan beban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah belum dapat menikmati hasil pembangunan.

Di samping itu dihadapkan pula masalah yang khas, yaitu persebaran penduduk yang tidak seimbang dan merata di setiap wilayah Republik Indonesia. Sebagian besar (108 % juta jiwa) atau sekitar 60 % dari seluruh penduduk, berada di pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia, sedangkan sisanya terpecah di pulau-pulau lainnya, diantaranya ada pulau yang hampir tidak ditempati manusia. Kepadatan penduduk di pulau Jawa mencapai lebih dari 800 orang per kilo meter persegi, sementara di provinsi yang lain misalnya di Irian Jaya hanya dihuni oleh 20 orang per kilo meter persegi.

Penduduk Indonesia yang demikian padat tentunya apabila dimanfaatkan merupakan potensi yang besar dan tak ternilai, seperti di Amerika Serikat misalnya. Pemecahan masalah penduduk yang sekaligus dapat diharapkan memperbaiki tingkat kehidupan golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Sudah barang tentu hal ini merupakan tantangan yang berat bagi bangsa dan negara, yang tentunya menuntut pemikiran dan kerja keras dari seluruh masyarakat.

Dari uraian tersebut permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana usaha-usaha memecahkan masalah kependudukan yang akan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat ?”

III. PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi pembangunan yang besar, tetapi juga harus disadari bahwa hanya dengan jumlah yang besar saja bukanlah jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan penduduk yang besar tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan justru akan mengundang bencana, dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap setiap program pembangunan yang sedang dilaksanakan, dapat pula menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi generasi-generasi yang akan datang.

Pada dasarnya kondisi penduduk Indonesia dewasa ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan penduduk yang masih besar mengakibatkan jumlah penduduk semakin membengkak.

Jumlah penduduk usia muda lebih banyak dari usia produktif yang berusia muda yang tinggi, besarnya penurunan angka kematian serta peningkatan usia hidup.

Dari kondisi seperti telah tergambar tersebut dirasa perlu untuk mencari jalan keluarnya demi suksesnya pembangunan nasional, pemecahan masalah diharapkan dapat melalui hal-hal berikut:

1. Memantapkan keberhasilan program Keluarga Berencana
2. Pelayanan sektor kesehatan
3. Transmigrasi
4. Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan dan ketrampilan
5. Meningkatkan produksi pertanian
6. Memperluas lapangan kerja
7. Meningkatkan peranan wanita

1. Memantapkan keberhasilan program Keluarga Berencana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa laju pertumbuhan penduduk yang besar akan mempengaruhi/mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat golongan berpenghasilan rendah, oleh sebab itu pertumbuhan penduduk harus ditekan semaksimal mungkin. Untuk mengemban tugas tersebut pemerintah melalui BKKBN telah berusaha memecahkan masalah di atas melalui program Keluarga Berencana.

Pengendalian tingkat kelahiran terutama diarahkan melalui usaha langsung yaitu melalui usaha peningkatan pelaksanaan program Keluarga Berencana yang mengajak penduduk untuk merencanakan keluarga sehingga memberikan dampak pada pengendalian kelahiran. Usaha ini selanjutnya akan memberikan dampak pengendalian pertumbuhan penduduk dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia. Usaha tidak langsung dari pengendalian kelahiran dilakukan secara terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya.

Untuk mengefektifkan jumlah penduduk Indonesia yang besar, diusahakan peningkatan kualitas penduduk antara lain dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Usaha ini dilakukan dengan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sementara itu untuk mempercepat peningkatan pendidikan dalam Pelita IV yang lalu, ditingkatkan motivasi untuk menyekolahkan anak dan memberlakukan wajib belajar bagi penduduk umur 7-12 tahun.

Program Keluarga Berencana dalam Pelita V telah meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang mempunyai ciri dan tatanan hidup yang berbeda-beda. Pelaksanaan program Keluarga Berencana disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dengan demikian petugas dapat mengajak penduduk berkeluarga berencana atas dasar kesadaran dan sukarela serta tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya. Di samping itu, pelestarian peserta Keluarga Berencana akan menganggap Keluarga Berencana sebagai suatu kebutuhan yang akhirnya memberikan dampak pada pengendalian kelahiran dan pelebagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Kondisi seperti itu akan dapat diwujudkan tentunya dengan peningkatan dan pengabdian penyuluh-penyuluh. Untuk menunjang kemampuan tenaga penyuluh ini pemerintah selalu meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan latihan secara berkala. Berikut ini disajikan data pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun anggaran 1983/84 s/d 1987/88.

Tabel 1. Jumlah Tenaga KB yang Mendapatkan Pendidikan dan Latihan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 1983/84 – 1987/88

No.	Kategori Tenaga KB	Tahun Anggaran				
		1983/ 84	1984/ 85	1986/ 86	1986/ 87	1987/ 88*)
1	Dokter	432	582	310	282	44
2	Bidan/pembantu bidan	1.838	1.312	146	302	378
3	Petugas lapangan	2.725	2.594	4.225	1.824	1.718
4	Petugas pencatatan dan pelapor	693	1.087	256	886	379
5	Petugas penerangan	587	314	1.399	794	105
6	Kader UPGK	68.177	3.244	18.781	16.678	30.457
7	Pembantu Pembina	2.005	4.39	1.399	470	746
8	Tenaga lainnya	3.232	4.118	0	2.227	20.986
Jumlah		79.234	13.670	26.516	23.463	54.813

*) Angka sementara (sampai dengan Desember 1987)

Sumber : Pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI

Secara keseluruhan tabel tersebut menggambarkan adanya fluktuasi pendidikan dan latihan tenaga KB selama lima tahun terakhir, artinya tidak terdapat kenaikan yang teratur dari tahun ke tahun bahkan terlihat bahwa sejak tahun anggaran 1983/84 terlihat penurunan yang drastik dan baru naik kembali dengan lambat dari tahun ke tahun. Hal tersebut bisa dimaklumi yakni diakibatkan resesi yang berkepanjangan selama tahun-tahun tersebut, akan tetapi sekalipun demikian dampak dari pendidikan dan latihan tersebut terlihat dengan meningkatnya peserta KB aktif setiap tahun anggaran.

2. Pelayanan Sektor Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan memberi prioritas pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga serta pencegahan penyakit, di samping upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dikembangkan

sistem kesehatan nasional terpadu dan dapat mendorong partisipasi masyarakat termasuk swasta.

Pembangunan kesehatan terutama ditujukan pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Perhatian khusus dalam hal ini perlu diberikan kepada daerah terpencil, daerah pemukiman baru termasuk daerah transmigrasi dan daerah perbatasan. Sehubungan dengan hal itu perlu ditingkatkan upaya untuk memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang lebih baik dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Upaya-upaya yang terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesehatan ini antara lain; pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga beresana. Perhatian khusus perlu diberikan pada perlindungan rakyat terhadap polusi, limbah industri, bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat, serta peningkatan pengawasan kesehatan lingkungan, obat, makanan dan minuman.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas sistem kesehatan nasional diselenggarakan melalui lima karya kesehatan yang disebut Panca Krida Husada yaitu:

- a. Peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan ;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan ;
- c. Perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan lingkungan ;
- d. Pengendalian, pengadaan, dan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan ‘
- e. Peningkatan dan pemantapan manajemen dan peraturan perundang-undangan (hukum)

Pelaksanaan Panca Krida Husada tersebut diusahakan seoptimal dan seefisien mungkin hingga dapat dicapai perbaikan tingkat kesehatan rakyat, yang terutama diukur dengan penurunan angka kematian bayi dan anak balita serta peningkatan harapan hidup rata-rata penduduk. Angka kematian bayo berhasil diturunkan dari 90,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun anggaran 1983/84 menjadi 70,0 per 1.000 kelahiran hidup pada akhir Pelita IV, dan angka kematian anak balita diturunkan dari 17,8 per 1.000 menjadi 14,0 per 1.000.

Selain melalui usaha peningkatan kesehatan yang telah disebutkan di atas, perlu juga digalakkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas, usaha kesehatan sekolah, kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan melalui laboratorium kesehatan.

- a. Pelayanan Melalui Pusat Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan melalui pusat kesehatan masyarakat hendaknya lebih diarahkan untuk peningkatan, pemerataan, dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan dengan peran serta masyarakat dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, khususnya

dapat diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu diharapkan agar pembangunan fisik dan kualitas personelnnya dapat semakin ditingkatkan. Sebagai gambaran Pelita yang lalu dapat dilihat perkembangan jumlah puskesmas seperti pada table 3 berikut ini:

- b. Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)
Pelayanan kesejahteraan ibu dan anak (KIA) merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian bayi dan anak balita, oleh karena itu pelayanan kia terus ditingkatkan. Sampai dengan tahun 1987/88 cakupan nasional pelayanan kia telah menjangkau sekitar 62 % ibu hamil, 55 % persalinan dan 50 % ibu menyusui.
- c. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Usaha kesehatan sekolah (UKS) sangat perlu ditingkatkan dan digalakkan, sehingga gejala-gejala penyakit secara dini dapat dicegah dan pemberian pengobatan tahap pertama pada anak-anak yang memerlukannya dapat terlaksana. Untuk mendukung kegiatan tersebut anak sekolah perlu diberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan dan perbaikan gizi.
- d. Laboratorium Kesehatan
Pelayanan dan peningkatan mutu laboratorium perlu diperhatikan baik kualitas dan kuantitasnya. Selain laboratorium pemerintah, sehingga jumlahnya semakin bertambah.

3. Transmigrasi

Upaya transmigrasi ini selain sebagai sarana penyebaran penduduk, juga sebagai pemerataan penduduk yang pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan, meningkatkan pendayagunaan sumber alam dan pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan itu terus dikembangkan pusat-pusat pemukiman baru dikaitkan dengan pembukaan dan pengembangan ke arah produksi, sehingga merupakan usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah baik di daerah asal maupun di daerah tujuan.

Dalam hal ini harus diperhatikan pemeliharaan kelestarian, kemampuan alam dan lingkungan hidup serta kondisi dan pengembangan nilai-nilai social budaya masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan tersebut tentunya perlu dimantkan koordinasi dan keterpaduan, baik antar sektor, daerah maupun nasional, mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasannya.

Selama lima tahun terakhir jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan dan ditempatkan di lokasi pemukiman 637.943 kepala keluarga yang terdiri dari 251.755 kepala keluarga yang berasal dari transmigran umum dan 386.188 kepala keluarga yang berasal dari transmigrasi swakarsa.

Melihat angka di atas ternyata transmigrasi swakarsa lebih besar 53.40 % dari transmigrasi umum, oleh sebab itu transmigrasi ini hendaknya semakin dikembangkan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka dengan sukarela mau bertransmigrasi.

4. Memperluas dan Mempertinggi Mutu Pendidikan dan Ketrampilan

Salah satu tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam melaksanakan amanat undang-undang dasar 1945 tersebut dalam GBHN ditetapkan bahwa pembangunan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti serta memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, untuk dapat menumbuhkan tenaga-tenaga pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan nasional.

Oleh sebab itu mutu pendidikan harus semakin ditingkatkan dengan mengerahkan tenaga, pikiran dan penyediaan sarana. Pendidikan dan ketrampilan tersebut sebaiknya diprogramkan secara luas, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan swasta sehingga dapat disiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan berkemampuan dalam rangka menciptakan manusia-manusia wiraswasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan sektor industri kecil yang sudah saatnya dikembangkan khususnya di luar Jawa.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dan lembaga-lembaga swasta telah berusaha membina pendidikan dan ketrampilan ini dalam setiap tingkat mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Selain itu pemerintah juga bertekad untuk memberantas buta huruf dengan melakukan program kejar paket A. Kemudian pembangunan fisik dalam sektor ini juga mendapat perhatian serius khususnya dalam pendidikan dasar seperti termuat dalam tabel 4. Perhatian dan bantuan tersebut menandakan betapa pentingnya sarana fisik untuk menunjang peningkatan pendidikan dasar.

5. Meningkatkan Produksi Pertanian

Peningkatan hasil pertanian ini diharapkan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat karena ketergantungan akan beras dari luar negeri akan membahayakan kelangsungan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Usaha-usaha tersebut telah membuahkan hasil yang dapat dibuktikan dengan telah terpenuhinya swasembada pangan.

Walaupun pembangunan pertanian diarahkan untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan ekspor, usaha-usaha dalam pembangunan pertanian juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas kesempatan kerja serta menunjang tujuan seperti telah dikemukakan di atas.

Usaha-usaha peningkatan produksi pangan juga ditekankan pada usaha diversifikasi tanaman pangan, yang di dukung oleh usaha peningkatan penyediaan benih, penyuluhan dan efisiensi pengelolaan air irigas serta usaha pengapuran pada lahan kesamaan tinggi. Kebijakan pokok untuk meningkatkan produksi palawija dan hortikultura aalah meningkatkan mutu benih, intensifikasi, melaksanakan diversifikasi dan ekstensifikasi serta perbaikan pemasarannya. Dengan kebijakan ini diharapkan peningkatan hasil pertanian dapat dicapai yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pelestarian Cagar Budaya terhadap Keputusan Berkunjung kembali wisatawan di Kota Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah sudah baik namun seiring perkembangan penduduk sebaiknya di tingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitas.
2. Hal mana berkaitan dengan tingkat IPM atau HDI yang semakin tahun harus semakin meningkat sesuai dengan kriteria dari PBB.
3. Penguatan dari segi sumber daya manusia, keuangan, pelaksana kebijakan harus terus baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini penulis akan mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada kementerian atau yang khusus menangani tentang kependudukan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kesejahteraan penduduk Indonesia harus lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk itu harus ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat.
3. Agar pemerintah lebih banyak mengalokasikan yang lebih besar dari tahun ke tahun untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan penduduk atau rakyat Indonesia sehingga SDM Indonesia dari tahun ke tahun meningkat.

BAHAN BACAAN

David M. Heer, 2007. *Masalah Kependudukan di Negara Berkembang*, R.G. Kartasapoetra SH. PT. Bina Aksara, Jakarta.

Lester R. Brown Etal, 2010. *Dua Puluh Dua Segi Masalah Kependudukan*, Terjemahan Masri Maris dan Zen Rosdy, Sinar Harapan dan Yayasan – Obor Jakarta.

....., 1984. *Masalah Kependudukan di Indonesia*, Lembaga Keluarga ABRI dan BKKBN, Jakarta.